



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
UNIT KERJA : SATUAN PENGAWAS INTERN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURAENI POU
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 893279

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.260.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/90 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 401.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/63 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 361.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 222.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 702.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 452.500.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
7. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
8. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
9. Tanah Seluas 2.250 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
10. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA A1F02N36M12 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI

Rp. 7.000.000

2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 701.640.360

F. HARTA LAINNYA

Rp. 110.000.000

Sub Total

Rp. 3.108.640.360

III. HUTANG

Rp. 125.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.983.640.360

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.